



**RENCANA KERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2025; dan
- b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Renja sekretariat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Renja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Renja inspektorat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Renja badan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Renja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Renja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Renja badan penanggulangan bencana daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Renja badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Renja badan riset dan inovasi daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Renja dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Renja dinas kesehatan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- l. Renja dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Renja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Renja dinas kearsipan dan perpustakaan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Renja dinas kebudayaan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Renja dinas ketahanan pangan dan perikanan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Renja dinas komunikasi dan informatika Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Renja dinas perhubungan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Renja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Renja dinas lingkungan hidup dan pertanahan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Renja dinas pariwisata Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Renja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Renja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Renja dinas ketenagakerjaan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Renja dinas pertanian Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Renja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Renja kecamatan nusa penida Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Renja kecamatan dawan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Renja kecamatan banjarangkan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ee. Renja kecamatan klungkung Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

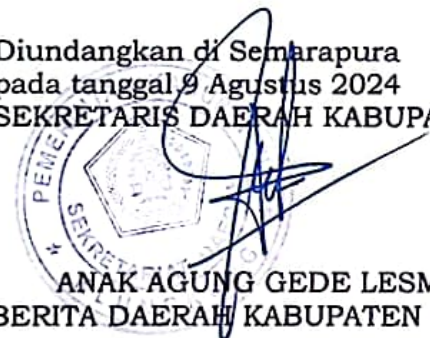
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Agustus 2024
PJ. BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun

untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35), (Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah);
- r. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2020 tentang RKPD Semesta Berencana Tahun 2021.
- s. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, ditetapkan dan diundangkan tanggal 10 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas SDM belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tujuh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian

kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Sekretariat Kabupaten Klungkung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2023)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		275.869.545.542,00		61.224.544.454,00	31,00	39.628.490.812,00	0,00	34.957.714.684,00	0,00	34.957.714.684,00	208,40	88,21	0,00	96.182.259.138,00	23,68	34,87	Asisten Administrasi Umum	RENJA
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						31,00		72,41		72,41				72,41				RENJA		
				Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten		95,00		90,00		95,00		0,00		0,00				90,00				RENJA		
				Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung						95,00		0,00		0,00				0,00				RENJA		
4	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85,00	78.688.773,00	85,00	22.455.600,00	90,00	17.795.900,00	90,00	13.083.550,00	90,00	13.083.550,00	100,00	73,52	90,00	35.539.150,00	105,88	45,16	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8,00	11.293.500,00	8,00	6.801.750,00	8,00	6.801.750,00	100,00	60,23	8,00	6.801.750,00			Analisis Perencana Ahli Muda	RENJA
4	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31,00	6.502.400,00	31,00	6.281.800,00	31,00	6.281.800,00	100,00	96,61	31,00	6.281.800,00			Analisis Perencana Ahli Muda	RENJA
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	90,00	57.723.982.194,00	90,00	32.154.650,00	90,00	18.142.156.832,00	90,00	17.229.932.520,00	90,00	17.229.932.520,00	100,00	94,97	90,00	17.262.087.170,00	100,00	29,90	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					138,00	18.110.269.532,00	138,00	17.203.376.020,00	138,00	17.203.376.020,00	100,00	94,99	138,00	17.203.376.020,00			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	RENJA
4	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14,00	31.887.300,00	14,00	26.556.500,00	14,00	26.556.500,00	100,00	83,28	14,00	26.556.500,00			Analisis Perencana Ahli Muda	RENJA

4	1	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2.858.296.332,00		599.388.476,00	100,00	560.192.812,00	100,00	558.942.312,00	100,00	558.942.312,00	100,00	99,78	100,00	1.158.330.788,00	0,00	40,53	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2,1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					60,00	560.192.812,00	60,00	558.942.312,00	60,00	558.942.312,00	100,00	99,78	60,00	558.942.312,00			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	RENJA
4	1	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	17.553.899.903,00	100,00	6.187.435.263,00	100,00	10.294.994.953,00	100,00	8.262.507.638,00	100,00	8.262.507.638,00	100,00	80,26	100,00	14.449.942.901,00	100,00	82,32	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12,00	4.938.572.013,00	12,00	3.968.566.346,00	12,00	3.968.566.346,00	100,00	80,36	12,00	3.968.566.346,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1,00	39.000.000,00	1,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	100,00	35,90	1,00	14.000.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12,00	931.223.000,00	12,00	685.307.950,00	12,00	685.307.950,00	100,00	73,59	12,00	685.307.950,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24,00	4.367.283.140,00	24,00	3.576.017.142,00	24,00	3.576.017.142,00	100,00	81,88	24,00	3.576.017.142,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2,00	18.916.800,00	2,00	18.616.200,00	2,00	18.616.200,00	100,00	98,41	2,00	18.616.200,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	90,00	5.533.982.313,00	90,00	963.446.164,00	100,00	1.818.615.173,00	100,00	1.607.509.271,00	100,00	1.607.509.271,00	100,00	88,39	100,00	2.570.955.435,00	111,11	46,46	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3,00	1.818.615.173,00	3,00	1.607.509.271,00	3,00	1.607.509.271,00	100,00	88,39	3,00	1.607.509.271,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	90,00	3.397.476.776,00	90,00	722.504.352,00	100,00	901.223.872,00	100,00	824.637.578,00	100,00	824.637.578,00	100,00	91,50	100,00	1.547.141.930,00	111,11	45,54	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5,00	901.223.872,00	5,00	824.637.578,00	5,00	824.637.578,00	100,00	91,50	5,00	824.637.578,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH dan WKDH	100,00	21.206.833.813,00	100,00	17.588.779.357,00	100,00	1.651.026.974,00	100,00	1.223.123.805,00	100,00	1.223.123.805,00	100,00	74,08	100,00	18.811.903.162,00	100,00	88,71	Kepala Bagian Umum	RENJA

4	1	1	2,1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2,00	1.003.426.974,00	2,00	638.123.805,00	2,00	638.123.805,00	100,00	63,59	2,00	638.123.805,00			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	RENJA
4	1	1	2,1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					8,00	31.600.000,00	8,00	15.000.000,00	8,00	15.000.000,00	100,00	47,47	8,00	15.000.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2,00	600.000.000,00	2,00	570.000.000,00	2,00	570.000.000,00	100,00	95,00	2,00	570.000.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00	6.012.040.466,00	100,00	840.000.000,00	100,00	840.000.000,00	100,00	759.845.942,00	100,00	759.845.942,00	100,00	90,46	100,00	1.599.845.942,00	100,00	26,61	Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2,1	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					12,00	480.000.000,00	12,00	462.115.942,00	12,00	462.115.942,00	100,00	96,27	12,00	462.115.942,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					12,00	360.000.000,00	12,00	297.730.000,00	12,00	297.730.000,00	100,00	82,70	12,00	297.730.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2,1		Penataan Organisasi	Persentase OPD dengan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Baik		3.092.887.730,00		424.593.342,00	100,00	352.736.600,00	70,97	339.619.134,00	70,97	339.619.134,00	70,97	96,28	70,97	764.212.476,00	0,00	24,71	Kepala Bagian Organisasi	RENJA
4	1	1	2,1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Perangkat Daerah Tinggi					70,00	15.450.000,00	29,03	13.817.150,00	29,03	13.817.150,00	41,47	89,43	29,03	13.817.150,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJA
4	1	1	2,1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Unit Pelayanan Dengan Standar Pelayanan Publik Memadai					70,00	20.546.600,00	87,50	17.616.825,00	87,50	17.616.825,00	125,00	85,74	87,50	17.616.825,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJA
4	1	1	2,1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Siap Mengikuti Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi					31,00	316.740.000,00	31,00	308.185.159,00	31,00	308.185.159,00	100,00	97,30	31,00	308.185.159,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJA
4	1	1	2,1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100,00	20.476.684.471,00	100,00	3.231.515.023,00	100,00	5.049.747.696,00	100,00	4.138.512.934,00	100,00	4.138.512.934,00	100,00	81,95	100,00	7.370.027.957,00	100,00	35,99	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	1	2,1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					12,00	394.900.012,00	12,00	320.347.474,00	12,00	320.347.474,00	100,00	81,12	12,00	320.347.474,00			Kepala Sub Bagian Protokol	RENJA
4	1	1	2,1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12,00	3.560.855.284,00	12,00	2.979.091.810,00	12,00	2.979.091.810,00	100,00	83,66	12,00	2.979.091.810,00			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA

		1	1	2,1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					12,00	1.093.992.400,00	12,00	839.073.650,00	12,00	839.073.650,00	100,00	76,70	12,00	839.073.650,00			Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		97,10	87,12			82,81	46,59		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		ST	T			T	SR		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	32.517.136.244,00	100,00	4.307.874.728,00	100,00	2.853.516.952,00	100,00	1.227.448.800,00	100,00	1.227.448.800,00	100,00	43,02	100,00	5.535.323.528,00	50,00	17,02		RENJA	
						Persentase Capaian IKU Kabupaten				100,00		100,00		100,00				100,00						RENJA	
4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	100,00	1.440.868.267,00	100,00	62.291.000,00	100,00	89.607.700,00	100,00	13.209.192,00	100,00	13.209.192,00	100,00	14,74	100,00	75.500.192,00	100,00	5,24	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA	
4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					2,00	65.194.700,00	2,00	8.388.692,00	2,00	8.388.692,00	100,00	12,87	2,00	8.388.692,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					6,00	13.911.000,00	6,00	2.718.500,00	6,00	2.718.500,00	100,00	19,54	6,00	2.718.500,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					2,00	10.502.000,00	2,00	2.102.000,00	2,00	2.102.000,00	100,00	20,02	2,00	2.102.000,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		9.960.465.986,00		1.321.765.296,00	100,00	1.877.836.686,00	100,00	550.752.630,00	100,00	550.752.630,00	100,00	29,33	100,00	1.872.517.926,00	0,00	18,80	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA	
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					1,00	1.852.430.474,00	1,00	550.752.630,00	1,00	550.752.630,00	100,00	29,73	1,00	550.752.630,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					1,00	22.047.512,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	

		1		2		2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1,00	3.358.700,00		1,00		0,00	1,00		0,00	100,00	0,00	1,00		0,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
4		1		2		2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan tepat waktu (Dokumen)		4.456.347.469,00			687.952.768,00	250,00	801.835.166,00		0,00	626.899.478,00	0,00	626.899.478,00	150,00	78,18	0,00	1.314.852.246,00	0,00	29,51	Kepala Bagian Hukum	RENJA	
							Tercapainya Presentase Capaian RAD HAM dan Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu						100,00		100,00		100,00			100,00		100,00								RENJA
4		1		2		2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					250,00	279.597.022,00		250,00		249.098.804,00	250,00	249.098.804,00	100,00	89,09	250,00	249.098.804,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA	
4		1		2		2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					4,00	474.693.532,00		4,00		331.373.132,00	4,00	331.373.132,00	100,00	69,81	4,00	331.373.132,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA	
									Presentase Desa Binaan Sadar Hukum					100,00		100,00		100,00						100,00						RENJA
									Presentase Laporan RD HAM					100,00		100,00		100,00						100,00						RENJA
4		1		2		2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					250,00	47.544.612,00		250,00		46.427.542,00	250,00	46.427.542,00	100,00	97,65	250,00	46.427.542,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA	
									Persentase Produk Hukum Daerah Terpublikasi					100,00		100,00		100,00						100,00						RENJA
4		1		2		2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah		400.886.400,00			81.928.300,00	100,00	84.237.400,00		100,00	36.587.500,00	100,00	36.587.500,00	100,00	43,43	100,00	118.515.800,00	0,00	29,56	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA	
4		1		2		2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					12,00	83.728.800,00		12,00		36.587.500,00	12,00	36.587.500,00	100,00	43,70	12,00	36.587.500,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
4		1		2		2	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						293.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00								Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
4		1		2		2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					1,00	215.600,00		1,00		0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																					112,50	41,42				25,00	20,78			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																					ST	SR				SR	SR			

					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan IKU Bidang Pembangunan dan Perekonomian	100,00	21.977.972.630,00	100,00	1.465.165.240,00	100,00	1.029.005.470,00	100,00	791.428.625,00	100,00	791.428.625,00	150,00	76,91	100,00	2.256.593.865,00	50,00	10,27	Kepala Bagian APPSDA	RENJA
						Tingkat Kepuasan Pengguna Atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa					3,40		0,00		0,00			0,00						RENJA
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya layanan bidang pembangunan dan perekonomian		1.553.314.161,00		80.573.142,00	100,00	79.798.612,00	0,00	55.059.812,00	0,00	55.059.812,00	200,00	69,00	0,00	135.632.954,00	0,00	8,73	Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan BUMD dan BLUD					6,00	8.932.600,00	6,00	2.540.000,00	6,00	2.540.000,00	100,00	28,44	6,00	2.540.000,00			Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Hasil Pengawasan dan pengendalian ketersediaan pangan					4,00	58.546.012,00	4,00	50.449.812,00	4,00	50.449.812,00	100,00	86,17	4,00	50.449.812,00			Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Penyaluran kredit usaha rakyat					4,00	12.320.000,00	4,00	2.070.000,00	4,00	2.070.000,00	100,00	16,80	4,00	2.070.000,00			Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai rencana		5.416.042.070,00		256.197.210,00	90,00	337.738.710,00	90,00	286.835.711,00	90,00	286.835.711,00	100,00	84,93	90,00	543.032.921,00	0,00	10,03	Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Program Prioritas Pembangunan Daerah yang difasilitasi dalam perencanaan					50,00	92.212.500,00	50,00	67.839.551,00	50,00	67.839.551,00	100,00	73,57	50,00	67.839.551,00			Kepala bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunanbangunan					12,00	70.819.400,00	12,00	50.468.600,00	12,00	50.468.600,00	100,00	71,26	12,00	50.468.600,00			Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah					12,00	174.706.810,00	12,00	168.527.560,00	12,00	168.527.560,00	100,00	96,46	12,00	168.527.560,00			Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3,00	3.770.613.596,00	3,00	366.209.676,00	3,00	424.946.386,00	3,00	367.046.440,00	3,00	367.046.440,00	100,00	86,37	3,00	733.256.116,00	100,00	19,45		RENJA
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					12,00	228.907.962,00	12,00	186.177.977,00	12,00	186.177.977,00	100,00	81,33	12,00	186.177.977,00			Bagian PBJ	RENJA
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					12,00	56.904.262,00	12,00	54.512.501,00	12,00	54.512.501,00	100,00	95,80	12,00	54.512.501,00			Bagian PBJ	RENJA
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					100,00	139.134.162,00	176,00	126.355.962,00	176,00	126.355.962,00	176,00	90,82	176,00	126.355.962,00			Bagian PBJ	RENJA

					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya alam		249.016.488,00		29.602.592,00	100,00	186.521.762,00	100,00	82.486.662,00	100,00	82.486.662,00	100,00	44,22	100,00	112.089.254,00	0,00	45,01	Kepala Bagian APPSDA	RENJA
4	1	3	2	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan hasil koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan daya Alam					6,00	186.521.762,00	6,00	82.486.662,00	6,00	82.486.662,00	100,00	44,22	6,00	82.486.662,00			Kepala Bagian APPSDA	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	125,00	71,13			25,00	20,80		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	S			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								165.182.327.208,00		33.498.792.211,00		43.511.013.234,00		36.976.592.109,00		36.976.592.109,00				70.475.384.320,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	152,80	69,38			41,23	20,72		
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	S			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH								165.182.327.208,00		33.498.792.211,00		43.511.013.234,00		36.976.592.109,00		36.976.592.109,00				70.475.384.320,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	152,80	69,38			41,23	20,72		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	S			SR	SR		

Sumber : Sirenbangda 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan -kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporn kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB.
KLUNGKUNG

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Reaisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	4	5	8	9
1	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	indeks reformasi Birokrasi kabupaten Klungkung	61,90	65,00	63,84	80,05	103,13	123,15

Sumber : Bagian Organisasi

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tujuh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 mendapat nilai B dengan point 67,67. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2024 dan tahun – tahun mendatang.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 mendapat nilai B dengan point 80.05. Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi implementasi Reformasi birokrasi di tahun 2024 dan tahun – tahun mendatang.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah bidang pemerintahan
2. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal.
3. Belum optimalnya evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan.
4. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.
5. Belum optimalnya kegiatan kebijakan bidang mental dan spiritual.

2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian SDA

1. Pengendalian Pembangunan Daerah belum optimal
2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal.
4. Pengurangan anggaran juga sangat berpengaruh untuk realisasi kegiatan – kegiatan penunjang program Pembangunan Daerah.

3. Bagian Umum

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. SDM di bagian perencanaan untuk mendapat perhatian khusus karna berkaitan erat dengan Aplikasi sehingga diperlukan SDM yang memadai
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.

3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomer 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebabkan sebagian kegiatan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Bagian lain saat ini telah dilimpahkan ke Bagian Umum tanpa diikuti oleh pelimpahan/pemindahan peronil/SDM yang memadai sehingga menyebabkan beberapa pelayanan menjadi kurang optimal..

4. Bagian Organisasi

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukungnya dan belum berubahnya *mind set* bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.
3. Penerapan aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam *software* aplikasi.
4. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
5. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan *Quality Assurance* atas hasil evaluasi dari evaluator.
6. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.
7. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan tidak punya masalah.

5. Bagian Hukum

1. Dalam pelaksanaan kegiatan legislasi peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan waktu Ketika ada koreksi terkait penyusunan rancangan produk hukum dikoreksi dan di print dibagian hukum sehingga kebutuhan akan ATK kertas dan tinta printer menjadi meningkat.
2. Kurangnya SDM yang menguasai penyusunan produk hukum sehingga rancangan produk hukum menumpuk dibagian Perundang-undangan.
3. Layanan Internet yang kurang optimal sehingga laporan yang dikirim tidak bisa tepat waktu.

6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas seperti alat-alat studio (kamera, handycam dan kelengkapannya), dan perangkat untuk editing video
2. Kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas
3. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas protokol dan peliputan
4. Belum optimalnya penjadwalan kegiatan pimpinan daerah sehingga berpengaruh pada belum optimalnya layanan bagi protokol dan komunikasi pimpinan daerah.

7. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

1. Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap pengadaan barang jasa.
2. Regulasi dan Kebijakan terkait Pengadaan Barang Jasa dari pemerintah pusat yang sangat dinamis, membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
3. Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomer 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah berpengaruh terhadap proses pelimpahan dan penyesuaian pelaksanaan tugas sehingga masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggungjawab diantara bagian di Setda Kabupaten Klungkung.

Faktor- faktor tantangan dan peluang yang muncul dari luar dan dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024.

Tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen kinerja, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal.

Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang yang ramping struktur dan kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi, peluang pengembangan layanan di semua unit kerja sebagai berikut :

1. Pengembangan layanan kerjasama daerah yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kerjasama daerah.
Pengembangan layanan publikasi dan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk hukum daerah.
2. Pengembangan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis elektronik untuk lebih meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan.
Pengembangan layanan pengendalian kebijakan pembangunan daerah untuk menjamin kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tepat guna bagi masyarakat.
Pengembangan layanan penerimaan tamu daerah yang mendukung promosi produk unggulan maupun program pembangunan daerah.
3. Reformasi Birokrasi yang tengah dilaksanakan menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah di seluruh unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Klungkung sebagaimana Tabel 2.4.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	SEKRETARIAT DAERAH				49.599.985.331,00					49.599.985.331,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Jumlah PD dengan budaya kerja OPTIMUM	10 Perangkat Daerah	44.761.977.625,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	70,49 poin	44.761.977.625,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum	Presentase Capaian KinerjaPerangkat Daerah	90%	27.349.490,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum	Presentase Capaian KinerjaPerangkat Daerah	90%	27.349.490,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	8 Dokumen	18.503.950,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	8 Dokumen	18.503.950,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	31 Laporan	8.845.540,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	31 Laporan	8.845.540,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Persentase LaporanKeuangan Terkirim TepatWaktu	90%	22.895.129.884,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Persentase LaporanKeuangan Terkirim TepatWaktu	90%	22.895.129.884,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/bulan	22.862.241.884,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/bulan	22.862.241.884,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	32.888.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	32.888.000,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	506.825.846,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	506.825.846,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	506.825.846,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	506.825.846,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	8.299.975.523,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	8.299.975.523,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.757.608.773,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.757.608.773,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.750.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.750.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	12 laporan	895.913.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	12 laporan	895.913.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	2.607.303.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	2.607.303.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20.400.750,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20.400.750,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	100%	2.952.264.120,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	100%	2.952.264.120,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.952.264.120,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.952.264.120,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Persentase Kendaraan Dinas dan jabatan dan Jabatan	100%	906.299.304,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Persentase Kendaraan Dinas dan jabatan dan Jabatan	100%	906.299.304,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatandi bayarkan Pajaknya	5 Unit	906.299.304,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatandi bayarkan Pajaknya	5 Unit	906.299.304,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Presentase Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH	100%	2.000.200.736,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Presentase Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH	100%	2.000.200.736,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ bulan	1.274.000.736,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ bulan	1.274.000.736,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	110.200.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	110.200.000,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	16.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	16.000.000,00	

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	600.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	600.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tanggan Sekretariat Daerah	100%	839.867.050,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tanggan Sekretariat Daerah	100%	839.867.050,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	479.999.150,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	479.999.150,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	359.867.900,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	359.867.900,00	
	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB terealisasi	95%	405.445.920,00	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB terealisasi	95%	405.445.920,00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	405.445.920,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	405.445.920,00	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100%	5.928.619.752,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100%	5.928.619.752,00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp1.268.874.264	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp1.268.874.264	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp4.546.163.188	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp4.546.163.188	

	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Rp113.582.300	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Rp113.582.300	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum	60 persen	2.980.476.926,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum	60 persen	2.980.476.926,00	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	208.294.480,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	208.294.480,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	114.674.980,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	114.674.980,00	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	5.026.100,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	5.026.100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	88.593.400,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	88.593.400,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	1.856.944.800,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	1.856.944.800,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1.832.243.096,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1.832.243.096,00	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	22.578.004,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	22.578.004,00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2.123.700,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2.123.700,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum	Presentase Desa Sadar Hukum yang dievaluasi	60 Persen	891.988.916,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum	Presentase Desa Sadar Hukum yang dievaluasi	60 Persen	891.988.916,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	250 Dokumen	360.964.948,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	250 Dokumen	360.964.948,00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	404.908.984,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	404.908.984,00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	250 Dokumen	126.114.984,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	250 Dokumen	126.114.984,00	

	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	100 persen	23.248.730,00	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	100 persen	23.248.730,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	22.683.350,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	22.683.350,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	359.790,00	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	359.790,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	205.590,00	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	205.590,00	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Tercapainya program prioritas pembangunan daerah	100 persen	1.857.530.780,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Tercapainya program prioritas pembangunan daerah	100 persen	1.857.530.780,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terpenuhinya layanan bidang Pembangunan dan perekonomian	100 persen	268.027.264,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terpenuhinya layanan bidang Pembangunan dan perekonomian	100 persen	268.027.264,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	98.715.970,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	98.715.970,00	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	117.975.334,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	117.975.334,00	

	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	51.335.960,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	51.335.960,00	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya alam	100 persen	216.683.884,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya alam	100 persen	216.683.884,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 laporan	216.683.884,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 laporan	216.683.884,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai rencana	100 persen	437.265.220,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai rencana	100 persen	437.265.220,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	178.868.800,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	178.868.800,00	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	74.892.200,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	74.892.200,00	

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	183.504.220,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	183.504.220,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan UKPBJ	4 Level	935.554.412,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan UKPBJ	4 Level	935.554.412,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	451.634.984,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	451.634.984,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	101.628.204,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	101.628.204,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	382.291.224,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	382.291.224,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengusung tema “Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi” yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun 2025	Cara Perhitungan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	83	Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program Pendukung
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum	Persentase Desa Sadar Hukum	60	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum)
	Tercapainya program prioritas pembangunan daerah	Persentase capaian program prioritas	60	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian APPSDA)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	90	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian PBJ)
	Terbangunnya budaya kerja	Jumlah PD dengan budaya kerja OPTIMUM	10	Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,49	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program OPD. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD. Adapun strategi dan arah kebijakan tahun 2025 yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terbangunnya budaya kerja	Percepatan reformasi birokrasi	Pembangunan komitmen pimpinan dan seluruh SDM
			Perbaikan tata laksana
			Peningkatan efektivitas kelembagaan
			Peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik
			Monitoring, evaluasi dan pemberian penghargaan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan kinerja	Penjenjangan Kinerja
			Integrasi rencana kinerja dengan rencana pembangunan daerah
			Penyelarasan rencana kinerja organisasi ke kinerja individu
		Peningkatan kualitas pengukuran kinerja	Pengumpulan data kinerja
		Peningkatan kualitas evaluasi kinerja	Pendampingan Evaluasi SAKIP
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja	Pendampingan penyusunan LKjIP
		Peningkatan kapasitas SDM SAKIP	Pembinaan SAKIP
		Optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penertiban administrasi pemerintahan dan kewilayahan
		Optimalisasi Pembentukan produk hukum Daerah	Optimalisasi perencanaan produk hukum daerah

	Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum	Publikasi produk hukum daerah	Optimalisasi JDIH
		Pengurangan tumpang tindih produk hukum	Evaluasi produk hukum daerah
		Pembinaan kesadaran hukum masyarakat di desa	Pembinaan ke desa
		Penegakan pelanggaran hukum	Pembinaan kepada pelanggar
		Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi masyarakat/OPD yang memerlukan	Pemberian bantuan hukum bagi pemerlu
		Akomodasi program prioritas dalam perencanaan dan penganggaran	Penyusunan roadmap pencapaian program prioritas
	Tercapainya program prioritas pembangunan daerah	Optimalisasi Pengendalian program prioritas pembangunan daerah	Monitoring program prioritas
		Optimalisasi Evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Pelaporan pembangunan daerah berkala
		Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Pendampingan pelaksana PBJ
	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik	Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Optimalisasi SPSE
		Optimalnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Pembinaan SDM PBJ

Sumber : Restra Setda 2024-2026

4.2 Program dan Kegiatan

Pemetaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020.

Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai diberlakukan pada penyusunan perencanaan tahun 2024. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Baperlitbang. Hasil pemetaan program dan kegiatan dalam Renstra Baperlitbang berdasarkan Program dan Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada Renja TA 2025 merancang pelaksanaan 3 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang meliputi satu bidang urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah yaitu Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				49.599.985.331,00		44.608.188.315,00
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	70,49 poin	44.761.977.625,00	71, 26 poin	39.560.594.241,00
4	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	90 Persen	27.349.490,00	90 Persen	27.339.490,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	8 Dokumen	18.503.950,00	8 Dokumen	18.493.950,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	31 Laporan	8.845.540,00	31 Laporan	8.845.540,00
4	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	90 persen	22.895.129.884,00	90 persen	18.754.792.694,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	138 Orang/bulan	22.862.241.884,00	138 Orang/bulan	18.720.863.744,00

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	14 Laporan	32.888.000,00	14 Laporan	33.928.950,00
4	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100 persen	506.825.846,00	100 persen	586.043.612,00
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	60 Dokumen	506.825.846,00	60 Dokumen	586.043.612,00
4	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100 Persen	8.299.975.523,00	100 Persen	7.942.056.623,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	12 Paket	4.757.608.773,00	12 Paket	4.525.187.873,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	1 Paket	18.750.000,00	1 Paket	39.000.000,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	12 Laporan	895.913.000,00	12 Laporan	885.023.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	24 Laporan	2.607.303.000,00	24 Laporan	2.473.181.000,00
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	2 Dokumen	20.400.750,00	2 Dokumen	19.664.750,00
4	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100persen	2.952.264.120,00	100persen	2.270.473.404,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	3 Unit	2.952.264.120,00	3 Unit	2.270.473.404,00

4	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100 persen	906.299.304,00	100 persen	902.449.304,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	5 Unit	906.299.304,00	5 Unit	902.449.304,00
4	01	01	2	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100persen	2.000.200.736,00	100persen	1.824.175.967,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	2 Orang/Bulan	1.274.000.736,00	2 Orang/Bulan	1.168.975.967,00
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	16 Paket	110.200.000,00	24 Paket	39.200.000,00
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	2 Orang	16.000.000,00	2 Orang	16.000.000,00
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	2 Orang/Bulan	600.000.000,00
4	01	01	2	12	Fasilitasi Kerumahtanggaan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah Tanggan Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100 Persen	839.867.050,00	100 Persen	840.000.000,00

					Sekretariat Daerah							
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	12 Paket	479.999.150,00	12 Paket	480.000.000,00	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	12 Paket	359.867.900,00	12 Paket	360.000.000,00	
4	01	01	2	13	Penataan Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi	Bagian Organisasi	95%	405.445.920,00	95%	455.671.395,00	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	2 Dokumen	405.445.920,00	2 Dokumen	455.671.395,00	
4	01	01	2	14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	Rp5.928.619.752,00	100 persen	Rp5.957.591.752,00	
					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp1.268.874.264	12 Laporan	Rp1.268.874.264	
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp4.546.163.188	12 Laporan	Rp4.575.135.188	
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp113.582.300	12 Laporan	Rp113.582.300	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	60 Persen	2.980.476.926,00	60 Persen	3.212.935.708,00	
4	01	02	2	01	Administrasi Tata Pemerintahan	Tepenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	100 Persen	208.294.480,00	100 Persen	172.053.784,00	

					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	2 Dokumen	114.674.980,00	2 Dokumen	126.204.174,00
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	1 Dokumen	5.026.100,00	6 Dokumen	19.986.210,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksana	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	2 Dokumen	88.593.400,00	2 Dokumen	25.863.400,00
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	100 Persen	1.856.944.800,00	100 Persen	1.996.274.960,00
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	1 Dokumen	1.832.243.096,00	1 Dokumen	1.962.033.496,00
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	1 Dokumen	22.578.004,00	1 Dokumen	28.316.544,00
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	umlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	1 Dokumen	2.123.700,00	1 Dokumen	5.924.920,00
4	01	02	2	04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	100 Persen	23.248.730,00	100 Persen	104.606.964,00
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	12 Dokumen	22.683.350,00	12 Dokumen	103.902.254,00
					Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	1 Dokumen	359.790,00	0 Dokumen	394.120,00

					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	1 Laporan	205.590,00	1 Laporan	310.590,00
4	01	02	2	03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Desa Sadar Hukum yang dievaluasi	Bagian Hukum	60 Persen	891.988.916,00	93 Persen	940.000.000,00
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bagian hukum	250 Dokumen	360.964.948,00	250 Dokumen	370.000.000,00
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian hukum	0 Kasus	404.908.984,00	1 Kasus	420.000.000,00
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bagian hukum	250 Dokumen	126.114.984,00	250 Dokumen	150.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tercapaiannya program prioritas pembangunan daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	100 Persen	1.857.530.780,00	100 Persen	1.834.658.366,00
4	01	03	2	03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	935.554.412,00	4 Level	713.283.852,00
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	451.634.984,00	12 Dokumen	451.634.984,00
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	101.628.204,00	12 Dokumen	131.718.344,00
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	382.291.224,00	120 Orang	129.930.524,00
4	01	03	2	01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terpenuhinya Layanan Bidang Perekonomian	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen	268.027.264,00	100 persen	343.840.690,00

					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	98.715.970,00	6 Dokumen	115.262.700,00
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 laporan	117.975.334,00	12 laporan	176.186.728,00
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Dokumen	51.335.960,00	4 Dokumen	52.391.262,00
4	01	03	2	02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan daerah sesuai rencana	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 Persen	437.265.220,00	100 Persen	477.295.791,00
					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2 Dokumen	178.868.800,00	2 Dokumen	134.602.440,00
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12 laporan	74.892.200,00	12 laporan	115.848.915,00
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12 laporan	183.504.220,00	12 laporan	226.844.436,00
4	01	03	2	04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya alam	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen	216.683.884,00	100 persen	300.238.033,00
					<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6 dokumen	216.683.884,00	12 dokumen	300.238.033,00

Sumber : SIPDRI 2025

Dari tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun pada pagu indikatif rancangan akhir renja sudah sesuai dengan rancangan awal renja Sekretariat, namun terdapat perbedaan dalam jumlah pagunya mengikuti penyesuaian pagu APBD pada RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2025.

PEJABAT BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA, S. Sos., M.M., CRGP., CGCAE